

**PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN  
SAKSI NON-MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum Islam (S.H.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



**ADE IRAWAN SYAH**  
**10521001036**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN SAKSI NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA”** Penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian studi lapangan, maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti antara lain : buku Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan, Agama*, Kencana, Jakarta: 2005.cetakan ke tiga.dan buku-buku pendukung lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode, Deduktif, induktif.dan Deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.yang terletak di jalan Rawa indah No.01 Arifin Ahmad Kel Sidomulyo timur kec Merpoyan damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Karena lokasi penelitian ini tidak sulit bagi Penulis untuk menghubunginya.

Perceraian adalah putusnya hubungan antara pasangan suami istri, sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Pada pelaksanaannya, khususnya dalam cerai talak adalah adanya pemberian hak cerai tersebut secara mutlak kepada suami. Namun bukan berarti hak tersebut dapat dipakai secara sewenang-wenang. Dalam artian dalam waktu kapanpun, pada tempat manapun. Sekehendak suami dalam menjatuhkan talak. Ada hal penting yang menjadi bagian dalam suatu proses terjadinya perceraian, yaitu saksi. Saksi disini bukan hanya saksi dalam artian yang sempit. Namun, saksi disini adalah saksi yang memberikan peranan yang vital dalam proses kelancaran, keabsahan sebuah tindakan hukum.

Penyebab adanya kesaksian non-muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru di karenakan dalam undang-undang tidak ada syarat khusus di terimanya saksi apakah itu Islam atau non muslim. Karena Undang-undang Peradilan Agama pasal 54 masih memberlakukan hukum acara peradilan umum sebagai hukum acara peradilan Agama sehingga aturan acara di lingkungan peradilan Agama sampai sekarang masih beranekaragam. Dalam arus globalisasi dunia sekarang ini masyarakat selalu berhubungan ekonomi, komunikasi dan informasi, gotongroyong bersama dan pemukiman. maka tidak mustahil terjadi kerjasama antara orang Islam dan non Islam, ketika terjadi perselisihan maka saksi non muslim yang di libatkan.

Tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian kasus perceraian dengan saksi non-muslim di pengadilan Agama. seiring perkembangan zaman saat ini dan akibat pengaruh globalisasi dunia maka mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja, apabila terjadi permasalahan maka tidak mustahil justru orang yang selain Agama Islam yang meyakinkan peristiwa tersebut.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I :PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Pokok Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	10
E. Metode penelitian.....	11
F. Teknik analisa data.....	13
G. Metode penulisan.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU.....	15
A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	15
B. Stuktur Keorganisasian.....	18
C. Tugas dan tanggung jawab.....	21
D. Bentuk perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	24
BAB III : KESAKSIAN DI PENGADILAN AGAMA.....	29
A. Kesaksian menurut hukum positif.....	29
B. Kesaksian menurut hukum Islam.....	38

BAB IV : TINJAUAN PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN SAKSI NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM.....	50
A. Penyebab adanya saksi non muslim di pengadilan Agama Pekanbaru.....	50
B. penyelesaian kasus perceraian dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama.....	59
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus tersebut.....	65
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. KESIMPULAN .....	72
B. SARAN .....	73

#### DAFTAR PUSTAKA

**PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN SAKSI NON  
MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PA PEKANBARU)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Saksi adalah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Kesaksian berasal dari pihak ketiga, keterangan saksi biasanya lebih obyektif ketimbang pihak yang berkepentingan, pentingnya keterangan saksi di karenakan banyaknya peristiwa/keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian saksi alat bukti yang masih tersedia.<sup>1</sup>

Saksi minimal berjumlah dua (2) orang, keterangan dengan satu (1) orang saksi saja dengan tidak ada alat bukti lain, di dalam hukum tidak dapat di percaya. Kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat menguatkan suatu perkara jika bersesuaian dan berhubung - hubungan.<sup>2</sup>

Setiap kesaksian harus juga berisi segala sebab pengetahuan. Pendapat – pendapat atau persangkaan yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian. Dalam menimbang harga kesaksian, hakim memperhatikan sepenuhnya persesuaian saksi – saksi, kecocokan kesaksian

---

<sup>1</sup> M. Nur Rasid, *Hukum acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996 h 40

<sup>2</sup> *Ibid.*, h .40

dengan yang diketahui dari tempat lain, tentang sebab – sebab yang mungkin pada saksi untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu, tentang kelakuan adat dan kedudukan saksi dan secara umum segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak.<sup>3</sup>

Persoalan saksi dan pembuktian di Pengadilan harus dibedakan antara saksi sebagai syarat hukum dengan saksi sebagai alat pembuktian karena fungsi keduanya sangat berbeda, misalnya sebagai syarat hukum sahnya nikah harus disaksikan minimal dua orang saksi tetapi untuk membuktikan sahnya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi, pembuktian bisa dengan pengakuan suami isteri, dengan sumpahnya, dengan akta nikah dan lain – lain.<sup>4</sup>

Status saksi dalam hukum Islam adakalanya untuk memenuhi syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan biasa juga sekaligus sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian syarat formal.<sup>5</sup>

Akan tetapi ketentuan Pasal 54 UUPA No.7 tahun 1989 ternyata masih memberlakukan hukum acara peradilan umum sebagai hukum acara peradilan Agama di samping yang sangat khusus yang sangat minimal,

---

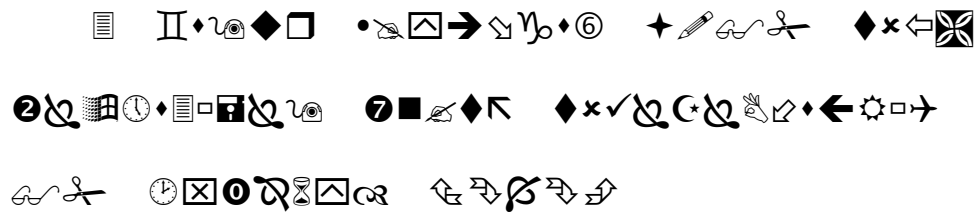
<sup>3</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.256

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, , *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: PT Raja Grapindo Persana, 2006),h.160

<sup>5</sup> *Ibid* h.161

akibatnya aturan beracara di lingkungan peradilan Agama sampai saat ini masih beraneka ragam.<sup>6</sup>

Di antaranya adalah mengenai kesaksian Non-Islam di pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan tidak ada memilah dan membedakan saksi dari segi jenis kelamin maupun agama, semua warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. sementara dalam hukum Islam mayoritas para ulama secara mutlak tidak membolehkan didengar kesaksian Non-muslim, apalagi menjadi landasan dalam memutuskan perkara di antara umat Islam. apabila kita menerima kesaksian mereka berarti kita memberikan kewenanga kepada mereka. seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisa (4) Ayat 141 yang berbunyi:



Artinya:”...dan Allah sekali-kali tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Aris Bintania, *Keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti di pengadilan Agama*, suska press, pekanbaru : 2008 h 2

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang:PT Karya Toha Putra,1995),h.146

Menurut Ibnu Rusyd para ahli hukum Islam sepakat atas persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu, seorang non muslim tidaklah di terima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang di persengketakan.<sup>8</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i, Kesaksian seseorang yang belum baligh, tidak merdeka dan bukan muslim tidak dibolehkan, dalam suatu urusan dunia. Orang-orang yang dapat di jadikan saksi itu haruslah orang-orang yang kamu rela dan setuju kesaksiannya, suatu kerelaan dan persetujuan tidak terdapat pada non muslim.

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang sifat-sifat untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis hakim. Menurut Ibnu Rusyd secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus di pegang oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan bukan budak, mempunyai iktikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam persidangan.<sup>9</sup>

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syaif'I menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Op Cit* h. 370

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Cencan 2008) h.376

<sup>10</sup> *Ibid* h. 381



Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, tentang kedudukan saksi dalam hukum pembuktian yaitu sebagai alat bukti, suatu kesaksian tidak boleh kecuali yang diketahui oleh saksi serta apa alasan seorang saksi memberikan kesaksian atas suatu perkara yang di sengetakan. diantara alat bukti lainnya yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara pihak-pihak yang berperkara, tidak begitu saja di terima sebelum saksi yang diajukan kemuka pengadilan memenuhi criteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian. menurut pendapat Sayid Sabiq syarat-syarat saksi itu ada tujuh yang telah di tentukan:

a) Beragama Islam

Saksi dalam hal ini haruslah beragama Islam karena syarat para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian ini yang dapat diterima bagi kesaksian seseorang haruslah beragama Islam.

b) Adil

Keadilan dari saksi dalam memberikan kesaksian sangatlah menentukan dalam penelitian hakim karenanya sifat adil dalam hal ini adalah menjauhkan perbuatan dosa, baik hati, menjaga kehormatan diri, dan bukan musuh atau lawan dari pihak yang berperkara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Roihan A. Rasyid *Op Cit* h.148

c) Baliq

Saksi yang belum mencapai usia baliq tidak dapat dijadikan sebagai saksi terlebih memberikan kesaksian.

d) Berakal

Persaksian dari pada saksi dapat diterima menjadi sebagai pembuktian dalam peradilan Agama jika saksi memiliki akal dan jiwa yang sehat sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh saksi dalam suatu perkara.

e) Tidak bisu

Orang yang bisu tidak di perbolehkan menjadi saksi kecuali yang bisa di pahami.

f) Hafal dan cermat

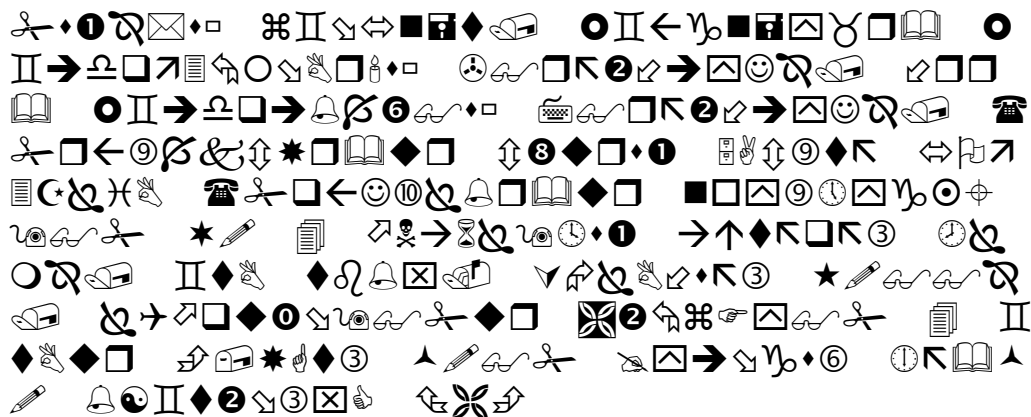
g) Tidak di curigai<sup>12</sup>

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka menganggap bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (tauliyah), sedangkan orang non-muslim tidak berkuasa terhadap orang-orang Islam. sebagaimana yang tersebut dalam surah an-Nisa ayat 141 dimana dikemukakan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-

---

<sup>12</sup> Said Sabiq, *Fiqih sunah*, Jilid 3, (Jakarta, :Cakrawala Publishing, 2009) h.461-467

orang non-muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam<sup>13</sup>. Demikian juga yang tertera dalam surah at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:



Artinya :”Maka apabila mereka telah datang akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikan lah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscahaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>14</sup>

Pengembangan ilmu hukum memiliki karakter preskriptif dan terapan, Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum dan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan, apabila alat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya

<sup>13</sup> Abdul Manan *Op Cit* h.380

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995), h.945

belum jelas, maka peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.<sup>15</sup>

Berikut penulis mengemukakan contoh kasus perceraian yang menggunakan saksi Non-muslim. seperti kasus. perceraian antara Pasangan Surya Ramadhan dengan Febri Titi Susanti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan No.0608/Pdt.G/2008/PA.Pbr. telah terjadi suatu perceraian karena pertengkaran yang terus menerus, bahkan tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat. Tentang duduk perkaranya bahwa antara pemohon dengan termohon tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran. Maka penggugat dan tergugat menghadirkan saksi –saksi mereka masing-masing di Pengadilan Agama.

Namun tergugat menghadirkan saksi Non-muslim di Pengadilan Agama, Atas Nama Nursilina Boru Naenggolan, umur 36 tahun, agama Kristen sedangkan dalam pandangan Islam tidak di bolehkan orang Islam yang berperkara menggunakan saksi non-muslim. Karena sama halnya kita memuliakan mereka.

Dan juga kasus perceraian yang terjadi antara pasangan suami isteri Dede Handrian dengan Nurmaini yang di putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan No.0137/Pdt.G/2009/PA.Pbr. di karenakan tergugat sejak bulan Noveber 2008 sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Dan di karenakan tergugat sudah

---

<sup>15</sup> Aris Bintania, *Op Cit* h.3

3 (tiga) kali ditahan di lembaga pemasyarakatan pekanbaru dan yang ketiga ini tergugat di hukum selama 3 tahun 8 bulan lamanya. Mereka cerai menggunakan saksi Non muslim atas nama Martina, umur 34 tahun, agama Kristen.

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai keberadaan saksi non-muslim tersebut dengan mengadakan studi lapangan. Dengan demikian penulis akan mengungkapkannya dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang berjudul :

**“PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN SAKSI NON-MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PA PEKANBARU)”**

## **B. Batas Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus dalam penulisan, maka penulis membahas tentang pembuktian kasus perceraian dengan saksi Non-muslim di pengadilan agama Pekanbaru dalam kasus perceraian yang dilaksanakan dari tahun 2008-2009 yang terdiri dari 2 kasus perceraian di tinjau menurut Hukum Islam.

### **C. Pokok Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penulis mencoba mengadakan penelitian dalam rangka menjawab pertanyaan berikut:

- 1) Apa penyebab adanya kesaksian non-muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- 2) Bagaimana penyelesaian kasus perceraian antara orang-orang Islam yang menggunakan saksi non muslim di pengadilan Agama Pekanbaru?
- 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian kasus perceraian dengan saksi non-muslim di pengadilan Agama tersebut?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini:

- a. Untuk mengetahui apa penyebab adanya saksi non-muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus perceraian antara orang-orang Islam di pengadilan Agama yang menggunakan saksi non muslim.
- c. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hal ini.

#### **2. Adapun kegunaan yang hendak di capai**

- a. Sebagai bahan informasi dan sumbangan kepada para pembaca khususnya untuk pengadilan Agama Pekanbaru.

- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang Hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada fakultas syari'ah di UIN SUSKA.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.yang terletak di jalan Rawa indah No.01 Arifin Ahmad Kel Sidomulyo timur kec Merpoyan damai Kota Pekanbaru Propinsi Riau, Karena lokasi penelitian ini tidak sulit bagi Penulis untuk menghubunginya.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Sebagai subjek penelitian ini adalah para Hakim yang memutuskan perkara dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kasus perceraian sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pembuktian kasus perceraian dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **3. populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim di pengadilan Agama pekanbaru yang berjumlah 10 orang. Dikarenakan jumlah ini relatif kecil, maka penulis tidak menggunakan sample.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kasus berkas salinan perkara cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu hakim yang menyelesaikan kasus cerai ini menggunakan saksi Non-muslim.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan judul yang diteliti dan pihak lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara langsung yang diarahkan kepada hakim yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara cerai yang menggunakan saksi non-muslim di Pengadilan Agama. orang yang berperkara cerai menggunakan saksi non-muslim, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan, yaitu membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan persoalan skripsi yang diteliti.



## 6. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang di peroleh digunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan jenis data tersebut, kemudian di uraikan dibandingkan antara satu dan lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti. Yang kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti yang selanjutnya diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang di teliti, menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisanya.

## 8. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penulisan ini dapat di pahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, Teknik analisa data, metode penulisan serta sistematika penulisan.

- Bab II : Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pekanbaru berisikan, Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, Struktur keorganisasian Pengadilan Agama Pekanbaru serta uraian tentang tugas, tanggung jawab dan bentuk perkara yang telah terjadi di pengadilan Agama.
- Bab III : Tinjauan umum tentang kesaksian di pengadilan Agama, Menurut hukum positif dan Menurut hukum Islam.
- Bab IV : Tinjauan tentang penyebab adanya saksi Non-muslim di pengadilan Agama pekanbaru. Yang mencakup: penyebab adanya saksi Non muslim di pengadilan Agama, penyelesaian kasus perceraian dengan saksi non muslim di pengadilan Agama serta tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus tersebut.
- Bab V : Kesimpulan dan saran
- Daftar Pustaka

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No. 99, maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>1</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya di Riau, maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah

---

<sup>1</sup> Effendi Siregar dkk (tim penyusun ), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru 2007, h. 4

Syari'ah Pekanbaru.<sup>2</sup> Dengan dilantiknnya KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, maka secara yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah berdiri, dan atas dasar hari pelantikan tersebut, maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru telah berumur 51 tahun.

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di Jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1960 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di Kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>3</sup>

Sepeninggal almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi

---

<sup>2</sup> *Ibid* .h. 4

<sup>3</sup> *Ibid*, h.5

dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah di Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988 – 1994), Drs Abdulrahman Har, SH (1994 – 1998), Drs. H.. Lumban Hutaberat, SH, MH (2004 – 2006), Drs. H. Masrum, MH (2007 – 2008) terajhir Drs. H. Taufiq Hamami mulai tanggal 20 Oktober - sekarang.

Saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 1 Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah – pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h 6

Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>5</sup>

Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama – sama dengan peradilan lainnya, memang secara yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga – lembaga peradilan Indonesia.

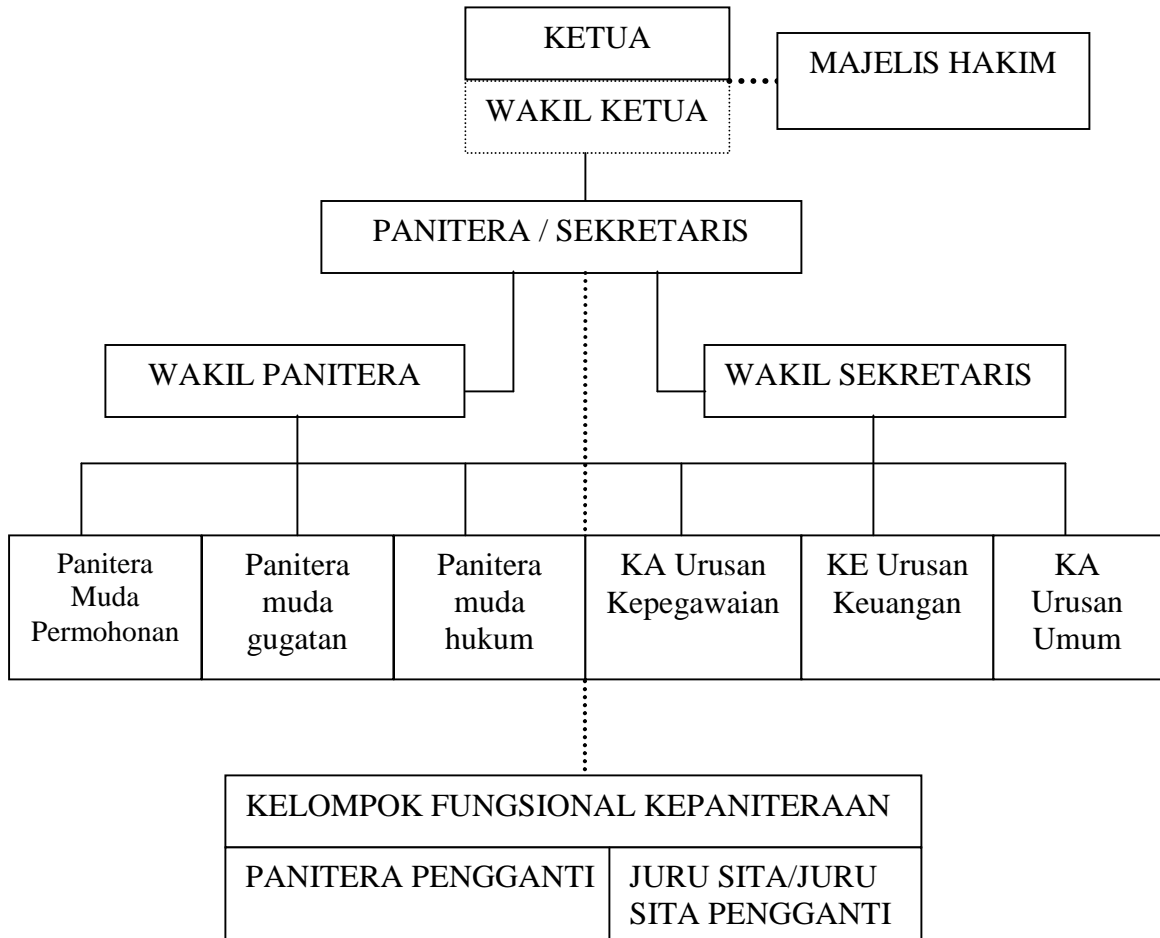
## **B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari ketua dan wakil ketua, majelis hakim, panitera / sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari panitera pengganti dan jurusita. Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

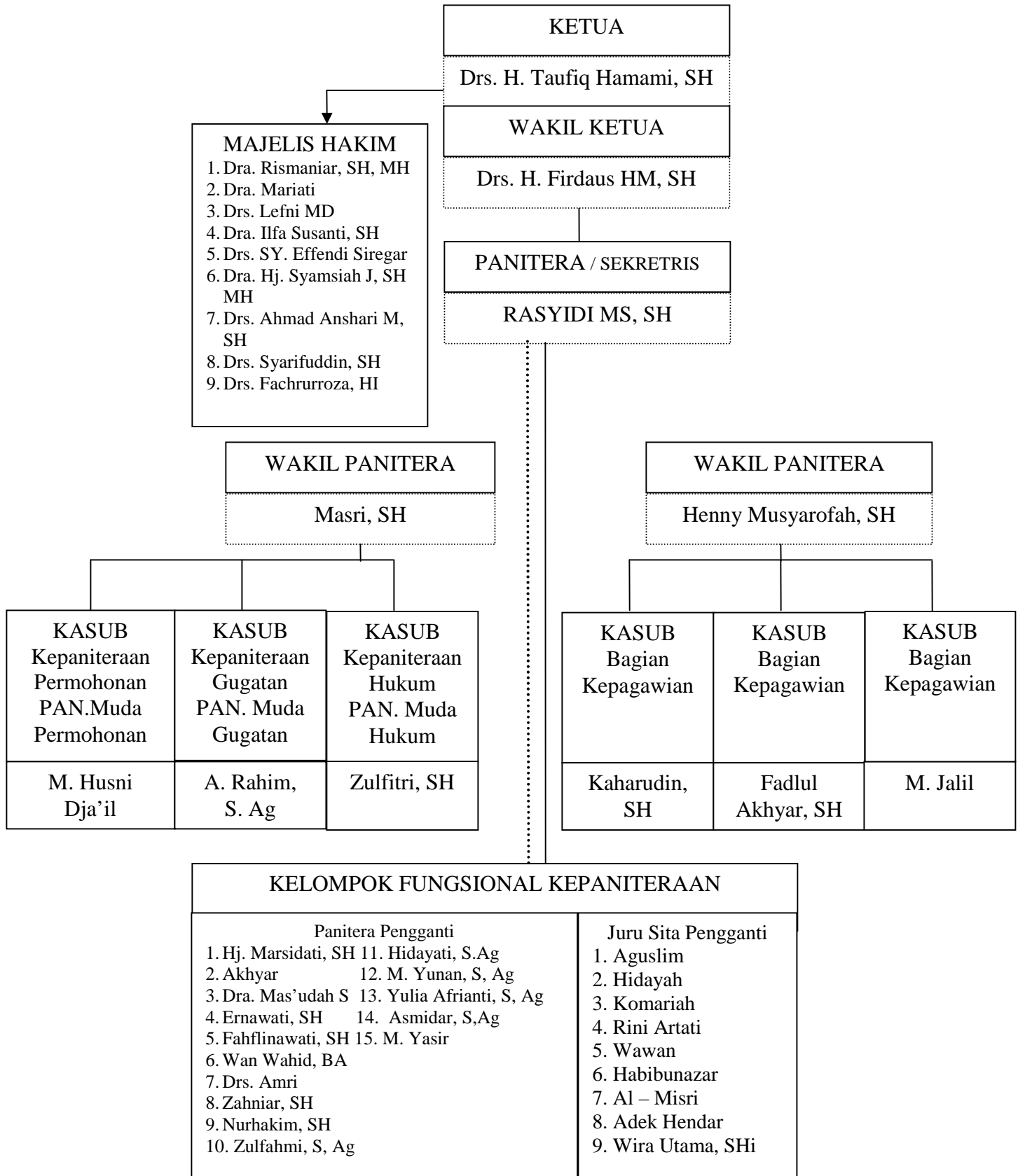
---

<sup>5</sup> *Ibid*

### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1 – A Pekanbaru



Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru periode ini, yaitu:





Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, Sebagai Berikut :

1. Ketua bertugas memimpin instansi dan seluruh pegawai, mengambil kebijakan, mengarahkan untuk tercapainya tujuan pengadilan baik di bidang fungsional maupun dalam bidang structural. Di samping sebagai ketua majelis hakim dibantu oleh wakil ketua bertanggung jawab kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung atas terselenggaranya peradilan.
2. Wakil ketua bertugas mendampingi ketua dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil ketua membawahi hakim pengawas bidang yang bertanggung jawab kepada ketua di samping ketua majelis hakim.
3. Hakim pengawas bidang, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk megawasi tugas dan fungsi pengelola apakah sudah sesuai dengan petunjuk aturan pola bindalmin dan administrasi kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada wakil ketua.
4. Hakim bertugas melaksanakan persidangan, menerima, menolak, menggugurkan, memutuskan dalam sebuah keputusan atau penetapan dibantu oleh panitera sidang dan jurusita pengganti.
5. Panitera / sekretaris membawahi bidang kepaniteraan, structural dalam menjalankan fungsinya agar urusan perkara dapat berjalan menurut pola bindalmin. Sebagai kuasa pengguna anggaran dalam bidang kesekretariatan, panitera / sekretaris dibantu oleh wakil panitera dan wakil dalam menjalankan

tugasnya dan bertanggung jawab pada ketua di samping sebagai panitera sidang.

6. Wakil panitera membawahi 3 (tiga) panitera muda (di bidang hukum, gugatan, permohonan) untuk mengkoordinir semua perkara yang masuk dan yang putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara serta penjahitan arsip perkara dan sebagai panitera sidang.
7. Wakil sekretaris bertugas menyelesaikan urusan kesekretariatan membawahi 3 (tiga) kepala urusan (kaur. Umum, kaur. Kepegawaian dan ortala dan kaur. Perencanaan dan keuangan). Wakil sekretaris juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan kantor.
8. Panitera muda hukum, sesuai dengan pola bindalmin meja 3, bertugas membuat laporan bulanan, tahunan (SIADPA), menjilid berkas perkara yang telah diminutasi, menyerahkan akta cerai, mengarsipkan berkas serta sebagai panitera sidang.
9. Panitera muda gugatan, sesuai dengan pola bindalmin meja 1 bertugas menerima perkara, menaksir dan memberi nomor, mencatat dalam buku register dan menaikkan perkara ke panitera. Setelah selesai disidangkan (diputus) oleh hakim, dicatat kembali dalam buku register, serta sebagai panitera sidang.
10. Panitera muda permohonan bertugas menerima perkara – perkara permohonan, mencatat dalam register, menaikkan berkas ke panitera dan

mencatat kembali setelah diputus atau ditetapkan oleh majelis hakim, serta sebagai panitera sidang.

11. Panitera pengganti bertugas menerima berkas perkara dari panitera, membantu meneliti dan melengkapi administrasi perkara, mempersiapkan pelaksanaan persidangan, mendampingi hakim dalam persidangan, membuat berita acara persidangan, menyerahkan berkas perkara yang diputus dan diminutasi kepada panitera muda hukum, membantu menyiapkan data perkara untuk laporan dan kemudian bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada panitera.
12. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah ketua majelis sidang, menyampaikan surat kepada pihak – pihak berperkara, melakukan penyitaan / eksekusi dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua Pengadilan Agama, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, membuat berita acara penyiaran dan berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
13. Jurusita pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua majelis sidang, membuat dan menyampaikan surat panggilan dan surat pemberitahuan kepada pihak – pihak perkara.
14. Kepala urusan umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas urusan umum, membagi tugas staf urusan umum serta memantau pelaksanaan tugas bawahan, menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang

surat menyurat, perlengkapan alat tulis kantor, perpustakaan, membuat laporan IKMN, membuat Inventaris, DIR, pembukuannya serta pengurusan penghapusannya dan memlihara kantor.

15. Kepala urusan kepegawaian dan ortala bertugas melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengumpulkan dan mengirim data kepegawaian, membuat surat usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP3, KP4, dan SIMPEG.
16. Kepala urusan perencanaan dan keuangan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan surat – surat keuangan, pembuatan DIPA, laporan – laporan keuangan (SAI) dan RKAKAL, dan menandatangani SP.
17. Bendahara penerima bertugas sebagai bendahara pengelolaan uang panjar biaya perkara, mendistribusikan dan mencatat dalam buku kas Bantu, buku registerasi dan buku jurnal, serta menyetorkan uang HHK . PNBP.
18. Bendahara pengeluaran (bendaha ruitn) bertugas mengambil dana, gaji, dan keperluan kantor serta membukukannya dalam buku kas.

### **C. Bentuk Perkara Di Pengadilan Agama**

Mengenai bentuk perkara yang di terima di pengadilan Agama dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL I

LAPORAN TAHUN 2008 PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU

TENTANG PERKARA YANG DI TERIMA

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	2
2	Pembatalan perkawinan	4
3	Cerai talak	256
4	Cerai gugat	566
5	Harta bersama	11
6	Penguasaan anak	6
7	Pengangkatan anak	7
8	Pemeliharaan anak	5
9	Itsbat nikah	7
10	Hak kewarisan	13
11	hibah	1
12	Penetapan ahli waris	13
13	Lain-lain	1
Jumlah		892

Sumber Data : Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2008

TABEL II

LAPORAN TAHUN 2008 PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU

TENTANG PERKARA YANG DI PUTUSKAN

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	1
2	Pembatalan perkawinan	3
3	Cerai talak	184
4	Cerai gugat	437
5	Harta bersama	6
6	Penguasaan anak	4
7	Pengangkatan anak	2
8	Pemeliharaan anak	5
9	Itsbat nikah	6
10	Hak kewarisan	6
11	hibah	1
12	Penetapan ahli waris	9
13	Lain-lain	5
Jumlah		667

Sumber Data : Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2008

**TABEL III**  
**LAPORAN TAHUN 2009 PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU**  
**TENTANG PERKARA YANG DI TERIMA**

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	3
2	Pembatalan perkawinan	4
3	Cerai talak	327
4	Cerai gugat	762
5	Harta bersama	17
6	Penguasaan anak	5
7	Pengangkatan anak	12
8	Pemeliharaan anak	3
9	Itsbat nikah	10
10	Hak kewarisan	11
11	hibah	1
12	Penetapan ahli waris	24
13	Melayani kewajiban	1
14	Wali Adhol	3
15	Perlawanan Eksekusi	1
16	Ibu tidak mampu	1
Jumlah		1185

Sumber Data : Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2009

TABEL IV

LAPORAN TAHUN 2009 PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PEKANBARU  
TENTANG PERKARA YANG DI PUTUSKAN

NO	NAMA PERKARA	JUMLAH
1	Izin poligami	3
2	Pembatalan perkawinan	3
3	Cerai talak	236
4	Cerai gugat	566
5	Harta bersama	5
6	Penguasaan anak	4
7	Pengangkatan anak	12
8	Pemeliharaan anak	3
9	Itsbat nikah	9
10	Hak kewarisan	7
11	hibah	1
12	Penetapan ahli waris	18
13	Melayani kewajiban	1
14	Wali Adhol	2
JUMLAH		870

Sumber Data : Kantor pengadilan agama kelas 1 A Pekanbaru, tahun 2009



### **BAB III**

#### **KESAKSIAN DI PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Menurut hukum positif**

Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, mendengar dan merasa apa yang terjadi (suatu peristiwa), tapi tidaklah semua saksi dapat diterima dengan begitu saja tanpa adanya seleksi, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, sebagaimana telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya.<sup>1</sup>

Pengadilan agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah.

Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rasid, *Hukum acara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996 h 40

Oleh karena itu, para praktisi hukum di pengadilan agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti, untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.

Perceraian adalah putusnya hubungan antara pasangan suami istri, sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Pada pelaksanaannya, khususnya dalam cerai talak adalah adanya pemberian hak cerai tersebut secara mutlak kepada suami. Namun bukan berarti hak tersebut dapat dipakai secara sewenang-wenang. Dalam artian dalam waktu kapanpun, pada tempat manapun. Sekehendak suami dalam menjatuhkan talak. Ada hal penting yang menjadi bagian dalam suatu proses terjadinya perceraian, yaitu saksi. Saksi disini bukan hanya saksi dalam artian yang sempit. Namun, saksi disini adalah saksi yang memberikan peranan yang vital dalam proses kelancaran, keabsahan serta kemaslahatan bagi sebuah tindakan hukum.

Dalam fiqh konvensional, keberadaan saksi tidak terlalu penting dalam perceraian. Namun dalam aplikasinya, yaitu peraturan perundang-undangan-hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyingkap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksistensi persaksian cerai talak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan yang

penyusun menggunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan umumnya, serta yang lebih khusus adalah tentang persaksian dalam cerai talak. Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan Normatif sebagai landasan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum persaksian perceraian tersebut bila ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, di dalam pasal UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, seorang suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, akan tetapi bukan berarti hak tersebut dapat dipergunakan secara mutlak, dalam arti dalam proses jatuhnya sebuah talak harus diadakan sidang penyaksian talak di pengadilan agama. Tujuan dari persaksian tersebut adalah agar mempunyai kekuatan hukum dan agar tidak ada kesewenang-wenangan atas hak yang dimilikinya. Implikasi hukum terhadap hak suami dalam penjatuhan talak kepada istri adalah apabila penjatuhan talak tidak diajukan kepada pegawai pencatat nikah, maka talak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan akan menimbulkan madarat bagi pasangan suami istri tersebut. Madarat yang ditimbulkannya adalah salah satu pihak (suami-istri) besar kemungkinan akan mendapatkan jalan keluar yang merugikan, karena masing-masing pihak akan mendahulukan kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kemaslahatan yang

lain. Maka alangkah baiknya perceraian hendaknya diajukan dan dipersaksikan dihadapan sidang pengadilan

1. *Saksi yang Tidak Mau Dihadirkan dapat Dihukum*

**Pasal 139 HIR / 165 R.Bg**

1. Jika Penggugat atau tergugat akan menguatkan kebenarannya dengan saksi – saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.Bg./121 HIR. Karena mereka itu tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan menentukan hari sidang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan.
2. Panggilan semacam itu dapat dilakukan terhadap saksi yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan perintah Karena jabatannya.<sup>2</sup>

**Pasal 140 HIR / 166 R.Bg**

1. Jika saksi yang dipanggil itu tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan sia – sia itu.
2. Ia dipanggil sekali lagi dengan ongkos sendiri.

**Pasal 141 HIR / 167 R.Bg**

1. Jika saksi yang dipanggil itu sekali lagi tidak hadir, maka ia dapat dihukum sekali lagi membayar ongkos yang dikeluarkan dengan sia – sia itu, dan pula harus mengganti segala kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak disebabkan ketidakhadirannya itu.
2. Kemudian Ketua dapat memerintahkan, saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh Polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.

---

<sup>2</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata peradiln agama dan mahkamah syari'ah di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2007, hal. 44

**Pasal 141 HIR / 166 R.Bg**

Jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya suatu sebab yang sah, maka pengadilan menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

*2. Pemeriksaan Saksi di Tempat Saksi*

**Pasal 169 R.Bg**

Apabila ternyata seorang saksi oleh karena sakit atau cacat badan, berhalangan untuk hadir menghadap ke persidangan pengadilan, baik karena suatu saat tidak dapat hadir maupun untuk selama – lamanya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan dan kalau kesaksian itu dianggap perlu oleh pengadilan, Ketua mengangkat seorang komisaris daripada anggota pengadilan dan memerintahkan komisaris itu pergi ke rumah saksi dengan bantuan panitera memeriksa saksi tidak dengan sumpah, menurut segala pertanyaan yang dituliskan oleh Ketua dan hasil pemeriksaan itu dibuat berita acara.

*3. Saksi Bertempat Tinggal di Luar Daerah Hukum Pengadilan yang Memeriksa Perkara*

**Pasal 143 HIR / 170 R.Bg**

1. Tidak seorang pun dapat dipaksa hadir menghadap Pengadilan Negeri untuk memberi kesaksian dalam perkara perdata jika empat tinggalnya berada di luar hukum Pengadilan Negeri itu.
2. Jika saksi yang demikian itu dipanggil tetapi tidak hadir maka ia tidak dapat dihukum karena itu. Tetapi pemeriksaan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum saksi itu bertempat tinggal dan pengadilan itu wajib mengirimkan dengan segera berita acara pemeriksaan itu. 2. (R.Bg). Jika saksi yang demikian itu dipanggil tetapi tidak hadir maka ia tidak dapat dihukum karena itu. Ketua pengadilan dapat meminta kepada pemerintah setempat tempat saksi bertempat tinggal meminta atau menyuruh meminta keterangan dengan sumpah pada saksi itu, jika saksi itu bertempat tinggal di daerah Jawa dan Madura. Dalam hal yang tersebut pada pasal di atas ini saksi diperiksa dirumahnya.

3. (R.Bg.). Jika saksi itu bertempat tinggal di suatu tempat di luar daerah hukum Pengadilan Negeri itu, pengadilan berkuasa mengirimkan surat permintaan seperti di atas kepada pemerintah setempat dalam hal untuk kepentingan perkara saksi tidak perlu hadir menghadap sendiri.
4. (R.Bg.). Jika saksi itu bertempat tinggal di daerah Jawa dan Madura maka pemeriksaan itu diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi itu. 3. (HIR.) = 6 (R.Bg.) : permintaan dan perintah yang tersebut dalam pasal ini, dapat juga terus dilakukan dengan tidak memanggil saksi lebih dahulu.
5. (R.Bg.). : Berita acara yang dibuat tentang pemeriksaan itu dikirim segera kepada Ketua Pengadilan Negeri itu. 4. (HIR.) = 5 (R.Bg.) : Berita acara pemeriksaan itu dibacakan dalam persidangan.<sup>3</sup>

#### *4. Kualitas Satu Orang Satu Saksi Saja*

##### **Pasal 169 HIR / 306 R.Bg**

Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai dalam hukum.

#### *5. Kesaksian Beberapa Orang yang Terpisah – pisah dan Berdiri Sendiri*

##### **Pasal 170 HIR / 307 R.Bg**

Jika kesaksian yang terpisah – pisah dan berdiri sendiri yang dikemukakan oleh beberapa orang tentang beberapa keadilan, boleh menguatkan suatu perkara yang terhenti, karena kesaksian itu berhubung – hubungan, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memperhatikan kesaksian yang terpisah - pisah dan berdiri sendiri keadaan.

#### *6. Syarat – syarat Kesaksian*

##### **Pasal 171 HIR / 308 R.Bg**

1. Tiap – tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi.

---

<sup>3</sup> M. Fauzan, *Ibid hal. 46*

2. Perasaan atau persangkaan istimewa, yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

#### *7. Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan*

##### **Pasal 144 HIR / 171 R.Bg**

1. Para saksi yang hadir pada hari yang ditentukan itu, dipanggil ke dalam seorang demi seorang.
2. Ketua menanyakan nama pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau kediaman saksi itu. Ditanyakan pula apakah saksi tersebut berhubungan keluarga dengan kedua belah pihak, baik karena hubungan daerah maupun karena perkawinan dan jika ada sampai derajat ke berapa. Selain itu ditanyakan juga apakah saksi bekerja atau sebagai pegawai salah satu pihak.

#### *8. Saksi yang Tidak Dapat Didengar Sebagai Saksi*

##### **Pasal 145 / HIR 172 R.Bg**

1. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu :
  - a. Keluarga sedarah dan keluarga. Karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
  - b. (R.Bg.) : Saudara laki – laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah keresidenan : Bengkulu, Sumatra Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewarisi di situ diatur menurut adapt setempat.
  - c. Istri suami adalah salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
  - d. Anak – anak yang tidak dapat diketahui benar apakah umurnya sudah cukup 15 tahun.
  - e. Orang gila meskipun kadang – kadang ingatannya.
2. Tetapi keluarga sedarah, dan keluarga. Karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara atau tanang suatu perjanjian pekerjaan.
3. Orang – orang yang tersebut dalam Pasal 174 ayat 1 Sub 1 dan 2 R.Bg. 146 ayat 1 dan 2 HIR. Tidak berhak minta dibebaskan dariada memberikan kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di atas.

4. (HIR) :Pengadilan Negeri berwenang memeriksa anak – anak dan orang gila. Yang terkadang terang ingatannya dengan tidak disumpah, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan saja.<sup>4</sup>

**Pasal 173 R.Bg**

(Sama dengan ayat 4 Pasal 145 HIR.).

*9. Saksi yang Dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi*

**Pasal 146 / HIR 174 R.Bg**

1. Orang yang dapat dibebaskan daripada memberi kesaksian , yaitu:
  - a. Saudara laki – laki dan perempuan dan ipar laki – laki dan perempuan dari salah satu pihak.
  - b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki – laki dan perempuan dari suami istri dari salah satu pihak.
  - c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia. Dalam hal yang semata- mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.
2. Pengadilanlah yang mempertimbangkan benar tidaknya keterangan orang di atas, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia tersebut.

*10. Saksi Harus Mengangkat Sumpah Sebelum Memberikan Keterangan*

**Pasal 147 / HIR 175 R.Bg**

Apabila orang tidak mnta dibebaskan daripada meberiian kesaksian atau jika permintaan untuk dibebaskan tidak beralasan, maka sebeum saksi itu memberikan keterangan lebih dahulu ia harus sumpah menurut agamanya.

**Pasal 148 / HIR 176 R.Bg**

Jika di luar hal yang tersebut pada Pasal 174 R.Bg. / 1946 HIR. seorang saksi yang hadir di persidagan, tidak bersedia bersedia bersumpah atau tidak mau

---

<sup>4</sup> M. Fauzan, *Ibid* hal.48



memberikan keterangan maka atas permintaan yang berkepentingan Ketua adapat memberi perintah supaya saksi itu disandera :

- R.Bg. selama – lamanya 3 bulan ata biaya pihak itu, kecuali jika sementara itu dipenuhi kewajibannya atau sudah dijatuhkan putusan oleh pengadilan dalam perkara itu.
- HIR. sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.

#### 11. *Tata Cara Pihak Mengajukan Pertanyaan Kepada Saksi*

##### **Pasal 148 / HIR 176 R.Bg**

1. Pertanyaan, yang akan ditanyakan oleh salah satu pihak kepada saksi, diberitahukan kepada ketua.
2. Jika diantara segala pertanyaan itu ada yang menurut pertimbangan pengadilan tidak berguna dalam perkara itu, maka pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan kepada saksi.
3. Atas kemauan sendiri hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang menurut pertimbangan berguna untuk mendapatkan kebenaran.

#### 12. *Ketentuan – ketentuan tentang Saksi dalam KUHPerdara Perkara Pidana*

##### **Pasal 178 ayat 4 R.Bg**

Ketentuan Pasal 586 dan 587 tentang saksi dalam KUHPerdara berlaku juga dalam hal ini

##### **Pasal 151 HIR**

Peraturan pada Pasal 284 dan 285 tentang saksi dalam perkara pidana, berlaku juga.

#### 13. *Keterangan Saksi Ditulis dalam Berita Acara*

##### **Pasal 145 / HIR 172 R.Bg**

Panitera Pengadilan Negeri mencata di dalam berita acara persidangan semua keterangan saksi, yang didengar di persidangan.

## B. Menurut hukum Islam

### 1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia berarti “ orang yang melihat atau mengetahui “, maksudnya, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tadi sungguh terjadi.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Peter Salim saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian.<sup>6</sup>

Kata saksi bahasa Arabnya : شاهد dan شهيد atau الشاهد Yaitu orang yang menerangkan apa yang diketahuinya. Jama'nya adalah dan masdarnya adalah ini الشهادة kabar yang pasti.<sup>7</sup>

Dalam kitab – kitab fiqh sulit sekali kita temukan adanya defenisi saksi menurut istilah. Defenisi saksi menurut istilah syara' pada umumnya diutarakan dalam definisi kesaksian oleh sebab itu sebelum penulis mengemukakan definisi saksi, terlebih dahulu memaparkan kesaksian :

الشهادة عبارة عن اخبار صدق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير. a.

Artinya : Kesaksian adalah ibarat dari pembuktian seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak orang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), h. 852.  
<sup>6</sup> Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 1309.  
<sup>7</sup> Al – Anshari, *Lisamul al – Arab*, (Kairo : Daar Misri, th), h. 225

---

83 <sup>8</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al – Qadla fil Islam*, (Kairo : Darul Nahdatul Arabiyah, 1964), h.

- b. اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Artinya : Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.<sup>9</sup>

- c. الشهادة انها اخبار بحق للغير على اشه.

Artinya : Bahwasanya kesaksian adalah pemberitahuan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh aku bersaksi.<sup>10</sup>

Lebih jelasnya apa yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, dkk, bahwa :

Saksi : Orang atau orang – orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apabila ada kebiasaan dalam masyarakat bahwa perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat, agar dapat menjadi alat bukti yang sah pembuktian harus mengenai hal – hal yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri yang disebut persaksian atas dasar yakin.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan saksi itu harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Ada suatu perkara atau obyek perkara.
- b. Dalam obyek tersebut terdapat hak – hak yang harus ditegakkan.
- c. Adanya orang yang memberitahukan obyek tersebut secara apa adanya tanpa memberi komentar.

<sup>9</sup> Ibnu Hamman, *Syarah Fathul Qadir*, (Mesir : Mustafa al – Babil Halabi, 1970), juz, IV, h. 415

<sup>10</sup> Mahally, *Qalyubi wa al – Umairah*, (Riyadh : Maktabah Ar – Riyadh al – Haditsah, th), juz, IV, h. 316.

<sup>11</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 306.

- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar obyek tersebut.
- e. Pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.<sup>12</sup>

Jadi saksi menurut penulis adalah orang yang menyaksikan peristiwa (kejadian), dan diberikan kepada hakim di persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara, untuk membenarkan terjadinya suatu hak terhadap orang lain atau membenarkan suatu masalah, yang orang lain tidak mengetahuinya.

## 2. Macam-macam saksi

Saksi berlaku dalam masalah Perkawinan, Muamalah *Jinayah*, Peradilan, Ibadah dan Lapangan Keagamaan lainnya. Saksi secara *funksional* ( menurut fungsinya ) di kelompokkan dalam dua bentuk :

1. Orang yang sengaja diminta hadir untuk mengetahui suatu peristiwa dan memberi keterangan tentang peristiwa tersebut.
2. Orang yang diminta keterangan tentang suatu peristiwa yang diketahui.

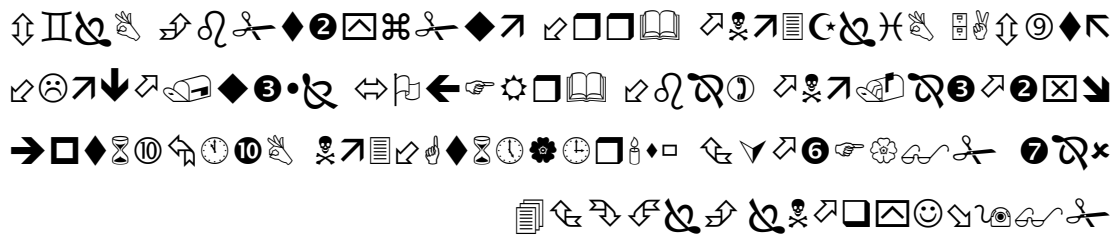
Berikut uraian macam – macam saksi :

- a. Saksi yang berhubungan dengan masalah Wasiat, Tholaq dan Rujuk harus disaksikan sekurang – kurangnya dua orang saksi laki – laki.

Masalah wasiat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat : 106

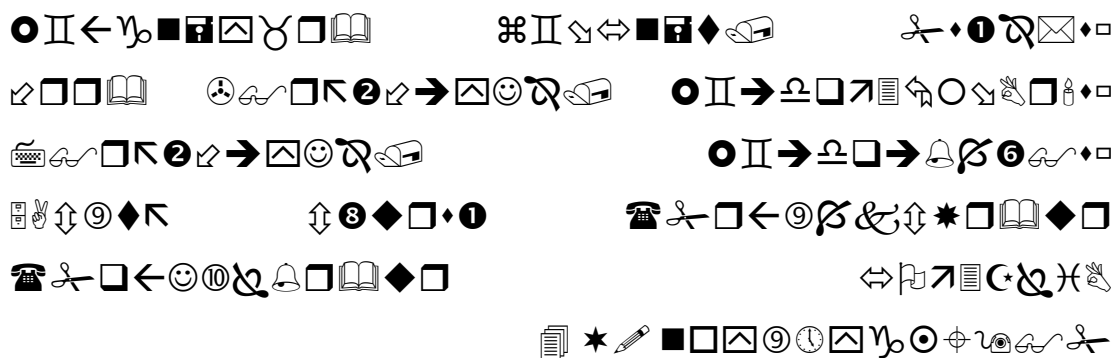


<sup>12</sup> Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jt. Pustaka Al – Husna, 1986).



Aritinya : Hai orang- orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hedaklah ( wasiat itu ), disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditempat bahaya kematian.<sup>13</sup>

Saksi dalam masalah rujuk, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Tholaaq ayat : 2



Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hedaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>14</sup>

Jadi permasalahan *Wasiat*, *Tholak* dan *Rujuk*, sekurang kurangnya harus disaksikan oleh dua orang saksi laki – laki yang diminta kehadirannya untuk menyaksikan peristiwa tersebut.

<sup>13</sup> Depag RI., *Op.cit.*, 180

<sup>14</sup> Ibid., h. 945



<sup>15</sup> Ibid., h. 70.





Artinya : Dan orang – orang yang menuduh wanita- wanita yang suci berbuat zina, kemudian mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dalapan puluh kali dera. Janganlah kamu terima kesaksian mereka selama – lamanya. Dan mereka itu orang – orang fasik.<sup>16</sup>

Kemudian firman Allah dalam surat al- Nisa' ayat : 15



Artinya : Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji ( zina ) maka hendaklah ada empat orang saksi laki – laki di antara kamu. Kalau mereka dapat

<sup>16</sup> Ibid., h. 543 - 544

membuktikannya, maka kurunglah perempuan dalam rumah sampai menemui ajal nya, atau Allah menentukan bagi mereka jalan yang lain.<sup>17</sup>

Had zina baru bisa dijatuhkan berdasarkan keterangan empat orang saksi laki – laki sebagai bukti bahwa telah terajadi perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang. Apabila mereka menuduh perempuan yang suci dan terperlihara ( afifah ) dan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka sebanyak dalapan puluh kali dan janganlah diterima kesaksiannya selama – lamanya.

- d. Saksi yang berhubungan dengan harta benda yang menyangkut miskinnya seseorang, dalam hal ini ia menghadirkan tiga orang saksi laki – laki.

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Hanabillah yang mengatakan :

قالت الحنا بلة ان من عرف غناه اذا ادعى انه فقير لىاء خذ من الزكاة لا يقبل منه الا  
ثلاثة شهود من رجال على ادعائه

Artinya : Golongan Hanabilah berpendapat : barang siapa yang diketahui kekayaannya, sedangkan ia mengaku miskin ( Untuk tidak mengeluarkan zakat ), maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali dapat mengemukakan tiga orang saksi laki – laki atas gugatannya.

Seseorang mempunyai kekayaan tetapi mengaku miskin, pengakuannya tidak dapat diterima terkecuali dengan mendatangkan saksi yang mengetahui tentang kehidupan dan keadaan hartanya. Karena bisa jadi pengakuan seseorang itu hanya sebagai alasan untuk tidak akan mengeluarkan zakat kepada yang berhak.

---

<sup>17</sup> Ibid, h. 118

Saksi itu diminta keterangan menyangkut ikhwal sebenarnya tentang keadaan hidup dan jumlah kekayaannya, dari keterangan saksi ini kemudian ditetapkan wajib tidaknya seseorang mengeluarkan zakat hartanya.

- e. Saksi yang berhubungan dalam perkara di Pengadilan. Ulama mazhab Maliki, Syafi'I dan Ibnu qayyim al – Jauziah berpendapat seseorang saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, persekutuan dagang. Alasan mereka karena Rasulullah pernah memutuskan perkara dengan saksi ditambah sumpah, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

(اخرجه مسلم و ابو داود والنسائي)

Artinya : Hadis dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. ( H.R. Muslim, Abu Daud dan Nasa'I )

Sedangkan Ulama Hanafi menolak pendapat bahwa kasus harta di pengadilan dapat diputuskan dengan suatu alat bukti seorang saksi dan sumpah, tapi harus diputuskasn dengan dua orang saksi laki – laki ditambah dua orang saksi perempuan didasari pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 282

Penulis memandang untuk memutuskan perkara mengenai harta di pengadilan harus dihadirkan dua orang saksi laki – laki atau seorang saksi laki – laki ditambah dua orang saksi perempuan, mernurut penulis satu orang saksi ditambah sumpah masih lemah dalam kedudukan status hukum menyangkut harta.

- f. Saksi dalam persoalan kewanitaan seperti melahirkan, haid, nifas dan aib wanita cukup disaksikan oleh seorang wanita, sebagaimana sabda Nabi SAW., yang berbunyi :

روى ابن شيبه عن الزهري مضت السنة انه يجوز شهادة النساء الا يصلح عليه غير ما من ولادة النساء

وعيو بهن (رواه الترمذی)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Syaibah dari Zuhri, telah berlaku sunnah bahwa kesaksian wanita pada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh selain wanita, seperti melahirkan dan aib mereka. ( H.R. Tarmidzi ).<sup>18</sup>

Jadi kesaksian wanita hanya menyangkut kesaksian dalam hal – hal yang tidak boleh dilihat laki – laki seperti keperawanan, cacat badan, haid dan aib wanita lainnya.

Demikianlah gambaran umum tentang keberadaan saksi secara fungsional dalam lapangan keagamaan, khususnya dalam permasalahan saksi yang boleh tidaknya menjadi saksi.

### 3. Syarat – syarat Saksi

#### a. Islam

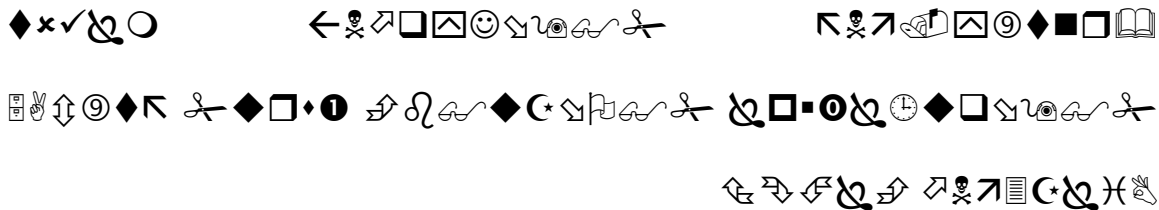
Orang non Muslim tidak diterima kesaksiannya atas orang Muslim.<sup>19</sup>

Kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al – Maidah ayat 106 yang berbunyi:



<sup>18</sup> Muhammad bin Ali Muhammad al- Syaukani, *Nail al – Autar*, ( Mesir : Babi al-Halabi, 1347 ), Juz VI, h. 272

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mudzakir, (Bandung : al – Ma’rif, 1998), jilid, 14, h. 57.



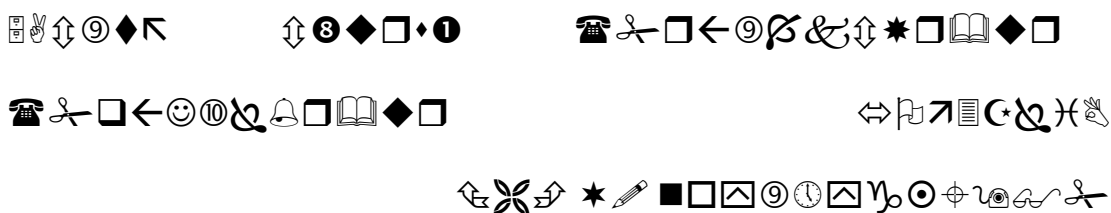
Artinya : Hai orang – orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu.<sup>20</sup>

#### b. Adil

Keadilan adalah salah satu syarat yang mutlak dalam sebuah kesaksian dan merupakan kelanjutan dari keislaman para fuqaha' telah sepakat untuk menjadikan sebagai syarat penerimaan kesaksian seorang saksi. Seorang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap yang lain, kecuali :

- Orang yang pernah memberikan kesaksian palsu
- Orang yang pernah dijatuhi hukuman mati
- Orang yang diragukan asal usulnya.<sup>21</sup>

Hal ini seirama dengan firman Allah SWT dalam surat Ath – Thalaq ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung : Gema Risalah 1989), h. 180.

<sup>21</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imran AM, (Surabaya : Bina Ilmu , 1990), h. 45

Ayat di atas, baik langsung atau tidak langsung saksi itu adalah orang yang adil, tidak pernah berkhianat dan tidak punya rasa permusuhan dengan tergugat dan bukan pula orang yang tertuduh dan bukan orang yang sudah di hukum dengan hukum qadzaf.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya, inilah yang dipilih dalam pengertian adil.<sup>24</sup>

Para fuqaha bersepakat bahwa kesaksian orang fasik bila dia telah bertaubat itu diterima.<sup>25</sup>

#### c. Baligh dan berakal

Baligh dan berakal adalah syarat kesaksian oleh karena itu kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil tidak diterima, begitu pula kesaksian orang gila (tidak waras), sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berperkara.<sup>26</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa kesaksian anak – anak tidak dianggap suatu kesaksian, tetapi merupakan suatu petunjuk.

#### d. Bersih dari tuduhan

Maksudnya adalah tidak diragukan I'tikad baiknya yang disebutkan oleh faktor kecintaan maupun faktor kebencian, misalnya kesaksian seseorang terhadap musuhnya atau terhadap orang yang dicintai. Hal ini sesuai dengan *Hadits* Nabi Muhammad saw, yang berbunyi :

---

<sup>22</sup> *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung : Gema Risalah, 1989), h. 945

<sup>23</sup> Muhammad Hasbi Ash – Shiddieqy, *Al – Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998), jilid, 2, h, 218

<sup>24</sup> Berkata Abu Hanifah : keadilan itu cukup dilihat dari keislamannya secara zhahir dan tidak diketahui dari-nya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Yang demikian ini adalah dalam hal harta benda dan bukan dalam hal *hudud*

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h. 61

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.62

روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز

شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya : Telah diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik Laki – laki maupun perempuan, dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian.<sup>27</sup> Terhadap saudaranya yang Muslim.

e. Berbicara

Menurut Abu Hanifah, Ahmad, dan Mazhab asy – Syafi’I, berpendapat bahwa, sudah barang tentu seorang saksi dapat berbicara. Apabila ia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Orang yang menyimpan kebencian, permusuhanannya itu tampak pada ucapan atau perbuatan. Tanda – tandanya ialah dia merasa senang terhadap bencana yang menimpa musuhnya, sedih terhadap kebaikan yang menimpanya, dan selalu menginginkan keburukan baginya.

<sup>28</sup> *Op.cit.*, h. 63

## BAB IV

### TINJAUAN PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN SAKSI NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Penyebab adanya Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama

1.ketentuan Pasal 54 UUPA No. 7 tahun 1989.

Sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bahwa peradilan Agama Pekanbaru adalah lembaga peradilan yang mengadili kasus perdata tingkat pertama, yang secara resmi didirikan pada tahun 1958, yang pada waktu itu diketahui oleh KH. Abdul Malik dengan nama Mahkamah syari'ah. Dasar berdirinya adalah PP No.45 Tahun 1957 yang mengatur Makamah Syari'ah (Peradilan Agama) tersebut.

Dari mulai berdirinya hingga sekarang peradilan Agama pekanbaru telah banyak menyelesaikan berbagai perkara, apakah itu perkara tentang perkawinan, kewarisan, hibah dan perkara-perkara lainnya yang menjadi kewenangannya.

Dalam ketentuan Pasal 54 UUPA No.7 tahun 1989 ternyata masih memberlakukan hukum acara peradilan umum sebagai hukum acara peradilan Agama di samping yang sangat khusus yang sangat minimal, akibatnya aturan beracara di lingkungan peradilan Agama sampai saat ini masih beraneka ragam.<sup>1</sup>

Di antaranya adalah mengenai kesaksian Non-Islam di pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan tidak ada memilah dan membedakan saksi dari segi jenis kelamin maupun agama, semua warga Negara sama kedudukannya di muka hukum. sementara dalam hukum Islam mayoritas para ulama secara mutlak tidak membolehkan didengar kesaksian Non-muslim, apalagi menjadi landasan dalam

---

<sup>1</sup> Aris Bintania, *Keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti di pengadilan Agama*, suska press, pekanbaru : 2008 h 2



memutuskan perkara di antara umat Islam. apabila kita menerima kesaksian mereka berarti kita memberikan kewenangan kepada mereka

Pada dasarnya semua orang dapat dijadikan saksi di muka pengadilan, akan tetapi undang – undang telah membatasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 145 – 146 H.I.R. Dalam Pasal 145 ayat (1) H.I.R./Pasal 172 ayat (1) R.Bg yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian.
3. Anak – anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun
4. Orang gila, meskipun kadang – kadang mempunyai ingatan yang terang.<sup>2</sup>

Keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke bawah yaitu anak cucu dan seterusnya, sedangkan menurut ketentuan ke atas adalah orang tua (bapak, ibu), orang tua dari orang tua (kakek, nenek) dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda adalah hubungan keluarga karena pertalian perkawinan. Keluarga semenda menurut keturunan kebawah yaitu menantu dari anak tiri, keluarga semenda menurut keturunan ke atas yaitu mertua (baik pihak laki – laki atau pihak perempuan), bapak atau ibu tiri salah satu pihak.<sup>3</sup>

Dalam hal perkara syikak, ketentuan yang menyatakan keluarga tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dikesampingkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989. dalam pasal tersebut dikemukakan

---

<sup>2</sup> Syarifudin, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>3</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syari'ah di Indonesia*, Kencana, Jakarta , 2007, hal. 46

bawa hakim sebelum mengambil keputusan haruslah terlebih dahulu mendengarkan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang – orang yang dekat dengan pihak suami istri yang berselisih itu. Menurut Drs Syarifuddin SH dalam peraturan perundang – undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, Karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terbuktinya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal tersebut kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi Non Muslim di Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Tentang perkara cerai gugat disini penulis akan paparkan kasus perceraian yang menggunakan saksi non muslim yang telah terjadi di pengadilan Agama Tahun 2008 sampai Tahun 2009:

1. Surya Ramadhan dengan Febri Titi Susanti yang dalam putusan :  
No.0608/Pdt.G/2008/PA

Berikut penulis mengemukakan contoh kasus perceraian yang menggunakan saksi Non-muslim. seperti kasus. perceraian antara Pasangan Surya Ramadhan dengan Febri Titi Susanti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan No.0608/Pdt.G/2008/PA.Pbr.telah terjadi suatu perceraian karena

---

<sup>4</sup> Syarifuddin, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

pertengkaran yang terus menerus, bahkan tergugat sering berbuat kasar terhadap penggugat. Tentang duduk perkaranya bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran.maka penggugat dan tergugat menghadirkan saksi –saksi mereka masing-masing di Pengadilan Agama Namun penggugat menghadirkan saksi Non-muslim di Pengadilan Agama, Atas Nama Nursilina Boru Naenggolan, umur 36 tahun, agama Kristen.<sup>5</sup>mereka tinggal di jalan Bukit permai Ujung Nomor 17 RT . 04 RW .01 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Bahwa penggugat dan tergugat telah melansungkan pernikahan yang di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama pada tanggal 23 Agustus 2001 di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan Akta Nikah.dalam pernikahan mereka di karuniai anak 2 orang Rivaldi Ananda Pratama (lk) dan Nasya Regina (pr).ada pun hakim yang memutuskan perkara tersebut Drs. Sy. Efendi Seregar, MH,Dra . Ilfa Susanti, SH, MH dan Drs.Syarifuddin,SH,MH.

Pada mulanya rumah tangga mereka berjalan sebagai mana biasanya, akan tetapi sejak satu tahun menikah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit di damaikan Maka menggunakan saksi non muslim di pengadilan Agama.

2. Tidak ada Orang Islam yang mengetahui kasus tersebut.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil – dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing – masing.

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Perkara No : 0608/Pdt.G/2008/PA.Pbr

Saksi – saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi – saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang berlangsung, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisa, dan sebagainya <sup>6</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembaharuan, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung diantara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama sering dijumpai kasus – kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti – bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegang pada kitab – kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus – kasus tersebut akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.<sup>7</sup>

2. Dede Handrian dengan Nurmaini yang di putus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan No.0137/Pdt.G/2009/PA.Pbr. di karenakan tergugat sejak bulan Noveber 2008 sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah lahir

---

<sup>6</sup> Syarifudin.,Hakim PA Pekanbaru ,Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>7</sup> Syarifudin.,Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

dan batin kepada penggugat. Dan di karenakan tergugat sudah 3 (tiga) kali ditahan di lembaga pemasyarakatan Pekanbaru dan yang ketiga ini tergugat di hukum selama 3 tahun 8 bulan lamanya.mereka tinggal di jalan pembangunan, No 21, RT .04 RW .06, Kelurahan Simpang tiga, kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.Mereka cerai menggunakan saksi Non muslim atas nama Martina, umur 34 tahun, agama Kristen.<sup>8</sup> Martina ini adalah pembantu rumah tangga penggugat dan tergugat yang tahu sekali penyebab terjadinya pertengkaran. Karena tergugat sudah lebih dari tiga bulan tidak memberinahkan wajib kepada penggugat terhitung sejak bulan Nopember 2008 hingga sekarang.ada pun hakim yang menyelesaikan permasalahan tersebut Drs. H. Firdaus HM,SH,MH,Dra Hj. Mariati dan Drs. Syarifuddin, SH, MH.

### 3. Kesaksian bersifat qadhaan bukan bersifat diyanatan.

Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal – hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat qadhaan, bukan hal yang bersifat diyanatan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim itu harus memenuhi syarat formal dan materiil persaksian.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Perkara No : 0137/Pdt.G/2009/PA.Pbr

<sup>9</sup> H Firdaus , Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

Supaya saksi – saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat – syarat formal materil.

Syarat formal alat bukti saksi :

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.

Berdasarkan pihak – pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dan pihak yang berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekali pun sudah bercerai, anak – anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.

3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.

Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang – orang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

4. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.<sup>10</sup>

Syarat materil alat bukti saksi :

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada dasar pengalaman, pendengaran, dan penglihatan

---

<sup>10</sup> H Firdaus , MA,Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum pembuktian disebut *restimonium de auditu*. Keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas yang dapat mempermudah perkara. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.<sup>11</sup>

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, serta kenyataan yang ada dalam kehidupan Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam Persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat Negara Indonesia ini tidak seluruhnya Muslim, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa / kelurahan banyak yang nonmuslim. Apakah hakim Pengadilan Agama akan menolak surat – surat bukti yang dibuat pejabat resmi Negara ini yang kebetulan bukan beragama Islam? demikian juga kehendak salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan salah satu

---

<sup>11</sup> Syarifudin., Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun.<sup>12</sup> Bagaimana kalau hakim yang memutuskan perkara perdata terhadap salah satu pihak itu beragama non muslim ? padahal putusan Pengadilan Negeri itu merupakan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak kepada majelis hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam masalah perceraian karena alasan cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, adanya penganiayaan, penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukan suatu hal yang mustahil yang memberi kesaksian dalam persidangan adalah saksi non muslim atau yang memberikan visum adalah dokter yang beragama nonmuslim. Apakah hakim Pengadila Agama harus menolak kesaksian tersebut ? demikian pula dengan perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan, penetapan asal usul anak, perwalian, dan harta bersama yang besar, kemungkinan surat – surat yang dijadikan bukti dalam persidangan majelis Hakim Pengadilan Agama itu dibuat oleh pejabat yang bukan beragama Islam, atau saksi yang diajukan beragama nonmuslim. Hal demikian, apakah hakim Pengadilan Agama menolak kesaksian yang demikian itu ?<sup>13</sup>

Dengan tetap berpedoman kepada nilai – nilai yang tersebut dalam al – Qur'an dan As – Sunnah, serta ketentuan – ketentuan yang tersebut dalam kaidah *Fiqhiyah* dan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, maka menurut hakim kesaksian nonmuslim baik merupakan keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Hal ini sepanjang hal – hal yang menyangkut masalah *qadhaan* guna memperjelas suatu

---

<sup>12</sup> Ahmad Anshari ,Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>13</sup> Syarifudin.,Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010



peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan *diyanatan* yang berhubungan dengan ketentuan syariat agama seperti masalah nikah, talak, dan rujuk.<sup>14</sup> Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.<sup>15</sup>

Hukum Islam dengan segala problematikanya saat ini merupakan tantangan bagi praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama dalam mengantisipasi perubahan social dan perubahan nilai dalam masyarakat sangatlah diharapkan. Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik – baiknya dalam menafsirkan aturan – aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas – asas hukum baru, dan kalau perlu melakukan *contra legem* dari suatu aturan hukum yang berlaku saat ini.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Rismaniar, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>15</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta: 2005, Cet Ketiga.h,383

<sup>16</sup> Abdul manan Ibid h, 384

## **B. Penyelesaian Kasus Perceraian dengan saksi non muslim di Pengadilan Agama.**

Dalam penyelesaian kasus perceraian yang menggunakan saksi non muslim tidak jauh berbeda dengan saksi muslim namun dari segi bersumpah di depan majelis hakim sedikit berbeda. Sebelum para saksi memberikan keterangan di dalam persidangan, mereka terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dipeluknya. Jika agama mereka melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka dapat diganti dengan janji.<sup>17</sup> dalam Pedoman Keseragaman Tata Kerja Pengadilan Negeri di Jawa Barat menjelaskan rumusan atau bunyi Pasal yang diucapkan sebagai sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bagi yang beragama Islam sumpah berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada sebenarnya”.
- Bagi yang beragama Kristen sumpah berbunyi “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”. Berdiri dan mengangkat tangan kanan setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengah.
- Bagi saksi ahli sumpah berbunyi “Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal – soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik baiknya”.
- Bagi yang berjanji berbunyi “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Syarifudin., Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>18</sup> Mariati, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemeriksaan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemeriksaan perkara perdata hakim harus berpegang pada patokan bahwa sesuatu hak meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya.<sup>19</sup>

Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang – undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan dalam pasal 150 KUH Perdata, perjanjian pertanggungan hanya dibuktikan dengan polis asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 258 KUHD. Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa ada bukti lain tidaklah dianggap saksi (*unus testis nullus testis*). Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain seperti surat – surat, pengakuan, dan sumpah salah satu pihak.<sup>20</sup>

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan hendaknya apa yang disaksikan dan dialami

---

<sup>19</sup> Syarifudin., Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>20</sup> Ahmad Anshari, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut. Keterangan yang didapatkan atas kesimpulan saksi tidaklah dapat diterima sebagai persaksian yang bernilai pembuktian, demikian juga keterangan yang didapat dari orang lain atau keterangan yang bersifat *testimonium de audita* bukanlah kesaksian (lihat Pasal 1907 B.W., dan Pasal 171 H.I.R/308 R.Bg).<sup>21</sup>

Hakim juga harus mempercayai saksi – saksi itu dengan penuh keyakinannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka hakim harus memperhatikan dengan seksama cara hidup saksi – saksi yang diajukannya, terutama tentang adat istiadat dan martabat kehidupan dalam masyarakat apakah tercela atau mempunyai kebiasaan jelek yang selalu meresahkan masyarakat, atau juga mempunyai reputasi baik dalam masyarakat sehingga menyebabkan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya. Jadi hakim harus memperhatikan dengan cermat segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi sikap saksi itu untuk menerangkan segala sesuatu dalam persidangan.<sup>22</sup>

Semua orang yang sehat pikirannya dan telah berusia 15 tahun dapat menjadi saksi dan wajib memberikan keterangan kesaksiannya apabila diperlukan. Jika ia enggan dan tidak mau memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi, maka ia dapat :

---

<sup>21</sup> H. Firdaus, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

<sup>22</sup> Ahmad Anshari, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

1. Dihukum untuk membayar biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi itu.
2. Secara paksa dibawa ke hadapan majelis hakim yang menyidangkan perkara yang ada kaitan dengan saksi itu.
3. Dimasukkan dalam penyanderaan atau *gizjeling*.

Hal ini menunjukkan bahwa menjadi saksi di muka persidangan merupakan suatu kewajiban bagi seseorang, jika ia menolaknya selain mendapat hukuman, ia juga dapat dituntut dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 522 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Pada dasarnya semua orang dapat dijadikan saksi di muka pengadilan, akan tetapi undang – undang telah membatasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 145 – 146 H.I.R. Dalam Pasal 145 ayat (1) H.I.R./Pasal 172 ayat (1) R.Bg yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

5. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
6. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian.
7. Anak – anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun
8. Orang gila, meskipun kadang – kadang mempunyai ingatan yang terang.<sup>23</sup>

Keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke bawah yaitu anak cucu dan seterusnya, sedangkan menurut ketentuan ke atas adalah orang tua (bapak, ibu), orang tua dari orang tua (kakek, nenek) dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda adalah hubungan keluarga karena pertalian perkawinan.

---

<sup>23</sup> Syarifudin, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

Keluarga semenda menurut keturunan kebawah yaitu menantu dari anak tiri, keluarga semenda menurut keturunan ke atas yaitu mertua (baik pihak laki – laki atau pihak perempuan), bapak atau ibu tiri salah satu pihak.<sup>24</sup>

Orang – orang yang diperbolehkan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 ayat (1) H.I.R, Pasal 114 R.Bg, dan Pasal 1909 alinea 2 B. W, atau disebut juga dengan hak ingkar. Orang – orang tersebut di atas, atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Mereka itu adalah :

1. Saudara Laki – laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak
2. Keluarga saudara menurut keturunan yang lurus dan saudara laki – laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.
3. Semua orang karena kedudukannya dan atau dalam hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia.<sup>25</sup>

Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaries dan polisi, sepanjang hal itu dipercayakan kepadanya untuk merahasiakan. Saksi – saksi yang dipanggil ke muka sidang pengadilan mempunyai kewajiban – kewajiban menurut hukum, yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan di persidangan, sedangkan dirinya telah dipanggil dengan patut dan sah

---

<sup>24</sup> M. Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syari'ah di Indonesia*, Kecana, Jakarta , 2007, hal. 47

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 48

2. Kewajiban untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan, sumpah ini menurut ketentuan agamanya dan bagi suatu agama yang tidak memperkenankan adanya sumpah maka diganti dengan mengucapkan

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan ketentuan<sup>26</sup>

Dalam hal perkara syiqaq, ketentuan yang menyatakan keluarga tidak boleh didengar keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dikesampingkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989. dalam pasal tersebut dikemukakan bawa hakim sebelum mengambil keputusan haruslah terlebih dahulu mendengarkan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang – orang yang dekat dengan pihak suami istri yang berselisih itu. Menurut Drs Syarifuddin SH dalam peraturan perundang – undangan tentang hukum acara perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, Karena prinsip utama dalam masalah pembuktian ini adalah terbuktinya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal tersebut kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan pasal 54 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi Non Muslim di Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Roihan Rasyid , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: raja Grafindo persada, 1994 Cek ketiga,h, 173

<sup>27</sup> Syarifuddin, Hakim PA Pekanbaru, Wawancara Tanggal 30 September 2010

### **C.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Tersebut**

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus tersebut mereka tangani apakah cerai thalaq atau pun cerai gugat mempunyai syarat-syarat atau ketentuan yang harus di ikuti dan di penuhi oleh seorang saksi. Kalau kita berbicara tentang masalah saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim sesama non muslim dan kesaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini sangat penting dibicarakan karena dalam praktik peradilan Agama sering terjadi kedua hal tersebut dalam penyelesaian masalah.

Setelah penulis mengamati bahwa kesaksian antara non muslim dapat diterima, baik itu seagama maupun tidak seagama. Dalam hal ini penulis mengemukakan pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya antara sesama orang kafir dzimmi dapat diterima beliau mengambil dengan dasar firman Allah surah ali Imran ayat 75 dan firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 73

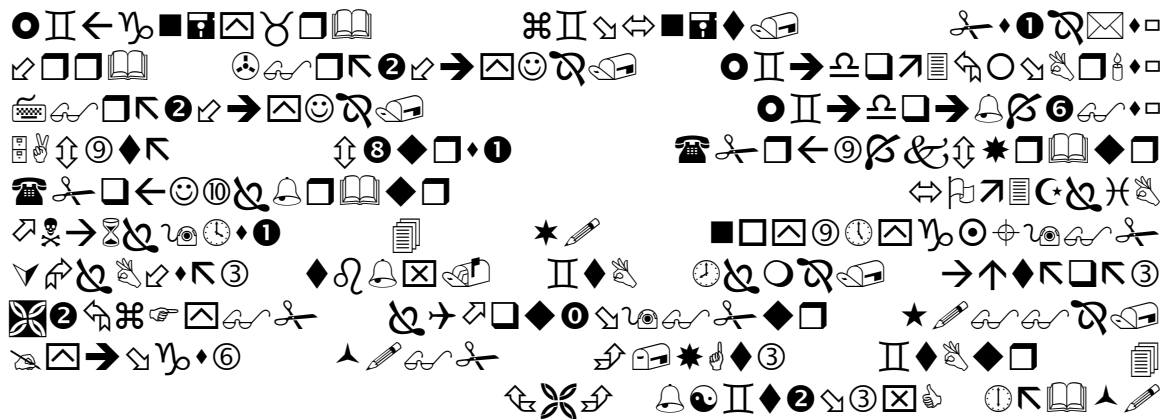
Sebagian pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang non muslim terhadap sesama mereka orang non muslim, asalkan mereka menganut Agama yang sama, dan menolak apabila Agama mereka beda, seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh orang Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Pendapat ini di dasari pada hadist Rasulullah saw, yang ad-Daruquthni dan Ibnu Adi dari Abu Hurairah ra, yang menerangkan tidak boleh menyakitkan terdapat pemeluk agama Muhammad saw<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta: 2005, Cet Ketiga.h, 380



Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka menganggap bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (tauliyah), sedangkan orang non-muslim tidak berkuasa terhadap orang-orang Islam. sebagaimana yang tersebut dalam surah an-Nisa ayat 141 dimana dikemukakan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang non-muslim berkuasa terhadap orang-orang Islam. Demikian juga yang tertera dalam surah at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:



Artinya :”Maka apabila mereka telah datang akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikan lah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>29</sup>

Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi nonmuslim atas orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan dan tidak ada satupun orang Islam yang dapat di angkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama nonmuslim. pendapat ini

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995), h. 945

dipakai juga oleh ulama dalam memutuskan perkara yang di ajukan. Akan tetapi jika Ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya membolehkan saksi non muslim, karena sebagian mereka ada orang yang terpercaya tentu orang yang terpercaya tidak hanya dapat di percaya terhadap sesama mereka tapi tentu juga dapat diterima sebagai saksi terhadap orang islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang nonmuslim. Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang nonmuslim yang ahli kitab saja, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa non muslim disini mencakup semua orang di luar Islam, termasuk orang majusi dan yang menyembah berhala.<sup>30</sup>

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syaif'I menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa namun pendapat yang mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non muslim kepada orang Islam sebenarnya perlu di tinjau ulang kembali. lebih lanjut penulis mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang terpenting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengemukakan tabir yang menutup kebenaran, orang yang dapat membuka kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapat diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan orang Islam, jadi pembuktian itu tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Manan Abdul, *Op Cit* .h. 380

<sup>31</sup> Ibid h 381

Jadi penulis berpendapat saksi non muslim di pengadilan dapat di bolehkan sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama yang lain yang tidak terikan dengan satu agama saja. Apabila terjadi permasalahan di antara mereka bukan suatu hal yang mustahil dan kejadian yang terjadi justru di saksikan oleh orang yang selain beragama Islam, pendapat ini banyak di pergunakan dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat

Maka sebenarnya menurut hemat penulis, dengan menjaga prinsip-prinsip dalam pembuktian, umat Islam dimungkinkan untuk menerima kesaksian non muslim sejauh hukum islam dapat ditegakkan dan kebenaran dan keadilan benar-benar di penuhi oleh pihak-pihak yang berhak dan tidak menzalimi atau menghilangkan hak-hak orang lain, dengan keadaan tidak ada satu pun lagi orang Islam yang menyaksikan, maka dalam hal itu lah saksi non muslim dapat di terima. untuk apa kita mempertahankan pembuktian harus orang islam semua sehinga mengakibatkan kerugian orang lain.

jadi kalau menurut penulis kesaksian non muslim di pengadilan Agama dapat di terima selama masih menyangkut masalah peradilan untuk memperjelas masalah atau kejadian yang telah terjadi. tetapi kalau masalah syari'at Islam seperti masalah nikah, talak dan rujuk maka kehadiran saksi merupakan syarat hukum bukan syarat pembuktian karena tidak mungkin dalam akad nikah saksinya non muslim.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai pembuktian kasus perceraian dengan saksi non muslim, jelaslah banyak terjadi kontradiksi mengenai penegakan norma-norma dan idialitas hukum Islam yang telah di abaikan. disamping itu adalah suatu yang sangat di butuhkan dan sangat darurat dan tidak ada satu pun orang Islam yang menyaksikan. ayat al-Qur'an membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang Islam.

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan yang di teliti

1. Penyebab adanya kesaksian non-muslim di Pengadilan Agama Pekanbaru di karenakan dalam undang-undang tidak ada syarat khusus di terimanya saksi apakah itu Islam atau non muslim. Karena Undang-undang Peradilan Agama pasal 54 masih memberlakukan hukum acara peradilan umum sebagai hukum acara peradilan Agama sehingga aturan acara di lingkungan peradilam Agama sampai sekarang masih beranekaragam, Tidak adanya orang Islam yang mengetahui kasus tersebut, dan pembuktian bersifat qadhan (pengadilan) bukan bersifat diyanatan (Agama)

2. Penyelesaian kasus perceraian antara orang-orang Islam yang menggunakan saksi non muslim di pengadilan Agama Pekanbaru sebenarnya sama saja tetapi sedikit berbeda tentang sumpah di depan hakim.
3. Tinjauan hukum Islam membolehkan terhadap pembuktian kasus perceraian dengan saksi non-muslim di pengadilan Agama. seiring perkembangan zaman saat ini dan akibat pengaruh globlisasi dunia maka mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja, apabila terjadi permasalahan maka tidak mustahil justru orang yang selain Agama Islam yang menyaksikan peristiwa tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang disampaikan atau yang dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah;

1. diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat lebih memahami tentang pembuktian dengan saksi non muslim di pengadilan Agama.
2. kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat memberikan kritikan dan penilaian yang objektif terhadap karya ilmiah yang penulis buat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: raja Grafindo persada, 1994 Cek ketiga
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Bandung 1989, Cet Kedua
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* 2002
- HA.Mukti Arto, *Peratek perkara perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 1996, Cet pertama
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Pustaka kartini, Jakarta: 1993 Cet Kedua
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Kecana, Jakarta: 2005, Cet Ketiga.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian hukum*, Kecana, Semarang: 2007 Cek ketiga.
- Martokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Surabaya: Libery, 1993 Cek perama
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Peess, tt, Cek Ketiga
- Soeryono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Peress, Jakarta: 1982.
- Aris Bintania, *Keabsahan saksi non muslim sebagai alat bukti di pengadilan Agama*, suska press, Pekanbaru : 2008
- Sayid Sabiq, *Fiqh sunah, Jilid 3* Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009

**DAFTAR TABEL**

TABEL I ..... 25

TABEL II.....26

TABEL III ..... 27

TABEL VI.....28

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa penyebab adanya saksi non muslim di pengadilan Agama ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus perceraian dengan saksi non muslim ?
3. Apakah tidak ada orang Islam di lingkungan penggugat dan tergugat ?
4. Berapa jumlah personil hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian ini ?
5. Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus-kasus perceraian yang menggunakan saksi non muslim ?
6. Bagaimana keputusan hakim terhadap kasus perceraian dengan saksi non muslim ?
7. Apa alasan hakim menerima saksi non muslim di pengadilan Agama ?
8. Setelah perkara diputuskan, Apakah masing-masing pihak penggugat dan tergugat menerima keputusan tersebut ?
9. Dari sejumlah kasus perceraian yang di ajukan, Apakah berakhir dengan perceraian ?
10. Berapa lama proses penyelesaian perkara dalam kasus-kasus perceraian yang di saksikan oleh saksi non muslim ?
11. Apakah setiap kasus perceraian dengan saksi non muslim diputuskan?